

DANA PUNIA SEBAGAI SUMBANGAN KEAGAMAAN UMAT HINDU LOMBOK DARI SISI AKUNTANSI

Ni Putu Ari Aryawati¹, Nengah Sukendri²
 Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram^{1,2}
 Email: ari-aryawati@iahn-gdepudja.ac.id

Keywords:

(Punia
 "Donation"
 Fund,
 Accountability,
 Transparent)

Abstract (Justify, Italic and Bold, book antiqua 11)

Punia "donation" fund is a religious contribution of Hindus people which must be done sincerely. Accountability push the management for make the punia funds be accountable and transparent. This study aims to interpret the perspective of the Hindu community in Lombok related to the concept of punia "donation" funds. Based on the philosophy of tat twam asi. This study uses an in-depth interview approach with an interpretive paradigm. The results of this study there is a positive relationship related to community behavior in implementing the punia "donation" fund with the philosophy of tat twan asi adopted by Hindus. The financial report for pura could be accountable and transparent. The implication of this research are the accounting of management punia "donation" funds is more complex

Kata kunci:

(Dana Punia,
 Akuntabilitas,
 Transparansi)

Abstrak

Dana Punia yang menjadi sumbangan keagamaan umat Hindu harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Pertanggungjawaban pengelolaan dana punia harus akuntabel dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai sudut pandang masyarakat Hindu di Lombok terkait konsep *dana punia*. Hal ini didasari pada filosofi *tat twam asi*. Data penelitian diperoleh menggunakan pendekatan interviu mendalam. Penelitian ini menghasilkan hubungan yang positif terkait perilaku masyarakat dalam melaksanakan *dana punia* dengan filosofi *tat twan asi* yang dianut oleh umat Hindu. Pelaporan keuangan pura harus akuntabel dan transparan. Sehingga implikasi yang dihasilkan adalah akunransi pada pengelolaan *dana punia* menjadi lebih kompleks.

Pendahuluan

Pura merupakan tempat suci dan tempat peribadatan bagi umat Hindu untuk melakukan penyerahan diri ke Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka meningkatkan

kualitas diri manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Keberadaan tempat suci yang disebut pura semakin menyatu dengan kehidupan masyarakat Hindu-Lombok karena jumlah masyarakat Hindu di Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram berjumlah 14,47% dari total keseluruhan penduduk Nusa Tenggara Barat (Badan Pusat Statistik, 2017). Selain itu di Kota Mataram, pura juga difungsikan sebagai sarana aktualisasi sosial dan budaya masyarakat Hindu.

Tradisi sumbangan keagamaan atau dana punia yang dilakukan secara tulus ikhlas dengan tujuan penyerahan kepada Tuhan merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh umat Hindu. "*Craddhayestam ca purtam ca nityam kuryada tandritah, craddhakrite hyaksaye te bhawatah swagatairdhanaih*" (Manawa Dharmasastra, Bab IV, Sloka 226). Sloka ini menjelaskan bahwa umat manusia yang senantiasa melakukan tindakan amal dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Dana punia dalam agama Hindu kental dengan nilai ajaran *tat twam asi* karena manusia merupakan makhluk sosial dan disertai dengan ketulusan. Sumbangan yang bersifat sukarela ini dikumpulkan dalam sebuah wadah atau kotak di bale pura yang kemudian dikumpulkan dan dihitung oleh panitia pujawali. Sehingga, harus disampaikan kepada masyarakat jumlah dana punia yang terkumpul dalam bentuk laporan keuangan dengan bentuk pelaporan akuntansi yang sederhana.

Akuntansi memiliki peranan alat pada lingkup entitas keagamaan seperti rumah ibadah dengan kombinasi agama (spiritual). Penelitian Badu dan Hambali (2014) yaitu sebagai entitas, masjid melaksanakan pelaporan dana yang berasal dari masyarakat dengan menggunakan dasar pelaporan akuntansi secara sederhana. Sumbangan yang terhimpun dari masyarakat berupa donasi, zakat, infaq, sedekah atau bantuan sosial lainnya. Praktik akuntansi pada entitas nirlaba dalam hal ini tempat ibadah merupakan hal yang belum lazim, namun bersifat mendesak dalam pelaksanaan proses pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan agar dapat diwujudkan kepercayaan umat. Pendeta dan umat yang beribadat ke gereja meyakini bahwa praktik pelaporan

keuangan dengan menggunakan akuntansi sederhana tidak mengganggu agenda suci yang dilaksanakan oleh gereja (Irvine, 2005).

Akuntansi digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan untuk institusi yang bersifat laba maupun nirlaba. Pengelolaan keuangan yang dimaksud harus transparan dan akuntabel agar terciptanya kepercayaan oleh masyarakat terkait dengan sumbangan keagamaan yang diberikan kepada entitas keagamaan dalam hal ini tempat peribadatan umat Hindu yang disebut dengan Pura. Sejalan dengan penelitian Triani dan Satyawan (2016) yang menyatakan bahwa akuntansi pada *piturunan* memiliki sifat yang kompleks. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah masyarakat sebagai sumber bantuan dana punia untuk Pura maka transparansi dan akuntabilitas sangat penting sehingga akuntansi harus mampu menjembatani kebutuhan antara pemberi dengan penerima dana punia. Hal ini penting agar akuntansi dana punia mampu digunakan sebagai alat akuntabilitas pengurus pura kepada masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigam interpretif dengan pendekatan kualitatif non-positivistik. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang mendekati realitas yang sesungguhnya (Chua, 1986). Paradigma interpretif menjelaskan pelaksanaan aktivitas yang mencari makna, memahami sebuah teori (Muhadjir, 2000: 199). Realitas sosial merupakan pemaknaan dan pemahaman individu. Oleh karena itu, realita sosial pasti bermakna majemuk, berubah atau bertahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang mendalam (*in depth interview*). Peneliti memperoleh data wawancara dengan cara mendatangi subjek yaitu komunitas masyarakat Hindu di Lombok. Informan pada penelitian ini difokuskan pada area Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk selanjutnya dilakukan proses mengamati dan berinteraksi dengan aktor sosial. Setelah memperoleh data yang cukup dan tepat selanjutnya penelitian menginterpretasikan hasil wawancara dengan menggunakan metode interpretif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Dana punia yang dihaturkan oleh umat Hindu di Lombok didasarkan pada filosofi *Tat Twam Asi*. Filosofi ini memiliki makna universal yaitu "aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua bersaudara". Konsep hidup ini mengandung nilai sosial tanpa batas. Semua orang membutuhkan bantuan, perlindungan dan rasa aman guna mencapai kebahagiaan yang dikenal dengan "*vasudhaivakutumbakam*" atau semua makhluk adalah saudara. Implementasi ajaran *tat twam asi* pada kehidupan masyarakat umat Hindu di Lombok adalah pelaksanaan dana punia yang dilakukan pada saat kegiatan. Salah satu bentuk implementasi ajaran Hindu ini dalam kehidupan masyarakat Hindu di Lombok adalah pelaksanaan dana punia yang dilakukan pada saat kegiatan *yadnya* atau persembahyangan.

Hal ini didukung pernyataan Bapak Wayan sebagai salah satu pengurus Krama Pura Dalem Karang Jangkong Bidang Penggalan Dana:

"Umat Hindu meyakini bahwa sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kewajiban sosial dan rasa saling memiliki satu sama lain. Salah satu filosofi hidup yang dimiliki oleh umat Hindu adalah *tat twam asi*. Ajaran ini mendorong masyarakat Hindu yang melakukan persembahyangan di Pura Dalem Karang Jangkong ini secara tulus dan ikhlas menghaturkan dana punia, baik dalam upacara *piodalan*, persembahyangan sehari-hari maupun dalam rangka renovasi pura."

Selain itu, pada Bhagawad Gita XVII. 20 disebutkan bahwa sumbangan "*Dana punia* atau sumbangan keagamaan yang dihaturkan dengan tulus ikhlas. Kewajiban suci yang tidak mengharapkan hasil dan diberikan kepada orang yang tepat akan menghasilkan pemberian yang dikenal dengan Satwika Dana (Pudja, 2003).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat sloka yang menyatakan bahwa:

*"na mata na pita kincit kasyacit pratipadyate
danapathyodano jantuh svakarmaphalamacnute"*

artinya:

"Bagi siapapun yang memberikan dana punia atau sumbangan keagamaan, Maka ia yang akan menikmati buah dan kebajikannya itu" (Sarasamuccaya Sloka 169).

Proses pengelolaan sumbangan keagamaan yang dikenal dengan dana punia di Pura Dalem Karang Jangkong dikelola secara terbuka dan transparan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Bapak Komang Budiana sebagai berikut:

"Pengelolaan dan manajemen sumbangan keagamaan yang kita kenal dengan *dana punia* pada Pura Dalem Karang Jangkong dilakukan secara transparan dimana dana yang ada di kotak sesari akan dihitung setiap bulan dan dilaporkan melalui rapat, *whatsapp* grup pengurus dan *whatsapp* grup krama pura serta pada saat acara piodalan seluruh dana yang diperoleh serta peruntukannya dilaporkans serta dipublikasikan dalam bentuk spanduk yang diletakkan di jaba sisi pura."

Selain proses pelaporan, pak Komang Budiana juga menambahkan terkait pengelolaan dana punia,

"Seluruh dana punia yang diperoleh akan dihaturkan sebanyak 1/3 kepada seluruh pemangku yang ngayah di Pura Dalem Karang Jangkong."

Hal ini dipertegas oleh Jro Mangku sebagai berikut :

"Dana punia yang diperoleh oleh Pura Dalem niki dikelola sederhana dan transparan oleh pengurus, agar seluruh banjar dan pengempon krama pura Dalem Karang Jangkong ini dapat dengan mudah memperoleh informasi dan memahami penggunaan dana. Sehingga mampu menghindari kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan."

Sebagai pemangku pura, Jro Mangku juga mengemukakan bahwa:

"Kebiasaan yang ada di masyarakat kita mengajarkan *menyama braya* sehingga semua tindakan yang kita lakykan akan bersama-sama menanggung suka dan duka yang terjadi sesuai dengan filosofi *tat twam asi*."

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa dana punia yang dihaturkan oleh umat Hindu ke Pura baik dalam rangka persembahyangan, *yadnya*, piodalan maupun pembangun sebuah pura dilandaskan oleh rasa saling memiliki dan

pengelola dana dalam hal ini pengurus diberikan kepercayaan dari seluruh krama pura.

2. Pembahasan

Praktik akuntansi dalam bidang sosial dan budaya memiliki perkembangan yang semakin beragam. Pertanggungjawaban aktivitas keuangan kepada publik dalam hal ini yang *mepunia* selalu dijaga oleh organisasi *non-profit oriented* dalam hal ini pura. Semua aktivitas keuangan yang berjalan dilaporkan oleh pengurus dalam periode tertentu. Laporan yang dibuat oleh pengurus dalam bentuk laporan aktivitas. Laporan aktivitas dikatakan akuntabel apabila laporan tersebut menyediakan informasi tentang transaksi keuangan lain yang mampu mengubah jumlah dan aset bersih yang dimiliki entitas keagamaan. IAI (2011: 45.19) menyatakan bahwa laporan aktivitas organisasi yang melakukan pengungkapan atas informasi pada laporan keuangan, dapat membantu donatur untuk meningkatkan kepercayaannya. Pertanggungjawaban akan diwujudkan dalam transparansi dan akuntabilitas. Badu dan Hambali (2014) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya laporan keuangan, terbatasnya fokus dari pemerintah terhadap organisasi keagamaan, pengetahuan SDM yang terbatas, serta diperlakukannya kajian islam secara menyeluruh. Namun pada realitasnya sebagian masyarakat masih menganggap laporan keuangan yang tidak perlu dilaporkan (Badu dan Hambali, 2014).

Konsep *dana punia* yang ada di Hindu didasarkan pada filosofi ajaran *Tat Twam Asi* , yang menyatakan bahwa “ia adalah kamu”, “saya adalah kamu”, dan “segala mahluk adalah sama”. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang dimotivasi oleh keinginan manusia yang bersangkutan.

Dana yang terkumpul dari kotak sesari maupun sumbangan yang berasal dari individu maupun organisasi membutuhkan perwujudan pertanggungjawaban keuangan dari pengurus. Hal ini bertujuan agar uang yang disumbangkan dapat digunakan untuk

membantu upacara *yadnya* dan kebutuhan maupun pembangunan pura. Pertanggungjawaban yang diperlukan berbentuk akuntabilitas dan transparansi atas kejelasan sumbangan keagamaan yang diperoleh sehingga dengan menggunakan modal pencatatan dan pembukuan dengan berdasarkan aturan akuntansi yang diharapkan atas kegiatan tersebut yang tidak mengharapkan diperolehnya laba (nirlaba) karena seluruh dana tersebut bersifat donasi.

Bendahara pura selaku pengelola dana wajib mencatat dan melaporkan arus kas dari aktivitas penerimaan dan aktivitas pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan pura baik dalam bentuk *yadnya*, piodalan, perbaikan, pemeliharaan hingga pembangunan pura. Total sumbangan keagamaan yang diperoleh dari *dana punia* dicatat pada buku penerimaan *dana punia* yang kemudian secara terjadwal dan rutin akan dilaporkan dalam rapat dan disampaikan secara utuh serta terperinci kepada pihak-pihak yang sudah menyumbang dan masyarakat luas. Apabila terdapat saldo sisa dana pada suatu periode tertentu, maka harus ditunjukkan fisik uang dan *print out* saldo rekening tabungan atas nama pura ataupun karma pura. Dimana rekening tabungan ini berfungsi sebagai penampung mutasi masuk dan keluarnya dana.

Dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus Pura adalah PSAK 45 tentang *entitas nirlaba*, menjadi dasar organisasi nirlaba di bidang keagamaan dalam hal ini Pura sebagai wujud pelaksanaan pencatatan keuangan dan pengelolaan sumber dana yang transparan dan berasaskan akuntabilitas atas laporan keuangan. Bendahara pura dapat membuat laporan dengan menginformasikan jumlah saldo awal penerimaan dan rincian pengeluaran serta menunjukkan sisa saldo yang belum digunakan tanpa mengurangi kualitas laporan. Bendahara juga membuat laporan realisasi anggaran untuk masing-masing periode kepengurusan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencairan dana.

Akuntansi menjadi bentuk pertanggungjawaban yang bertujuan untuk memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pencatatan dan pelaporan akuntansi pada pura menjadi sebuah proses pengakuan keuangan dengan menggunakan dasar

cash basis dimana pemasukan dan pengeluaran diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Berdasarkan PSAK 45 sebagai dasar organisasi nirlaba melakukan pencatatan dan proses penyusunan keuangan yang bersumber dari sumbangan maupun donasi dari masyarakat Hindu di Pulau Lombok, maka penerimaan pokok diperuntukkan dalam upaya membiayai program kerja organisasi nirlaba yang bersifat terikat dan/atau bebas dengan tuntutan pengelolaan keuangan yang menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntansi atas pelaporan keuangan pura merupakan wujud pertanggungjawaban yang memudahkan umat atau *atiti bakti* pura untuk mengetahui kebutuhan pura dan kerelaan yang tulus ikhlas dalam memberikan *puniannya*. Sehingga bagi umat Hindu yang merasakan bahwa apapun yang dihaturkan sebagai sumbangan dharma bakti merupakan perwujudan perilaku gotong royong.

Simpulan

Dana Punia yang disumbangkan oleh masing-masing umat atau masyarakat yang beragama Hindu kepada sebuah pura merupakan sebuah kesadaran religius sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku memberikan sumbangan kepada pura baik dalam kegiatan sehari-hari, *yadnya*, maupun pembangunan tidak menyebabkan adanya beban ekonomi, hal ini berdasarkan hasil wawancara terkait keikhlasan masyarakat dalam berdana punia dan pengurus dalam melakukan pengelolaan dana punia.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana punia mengharuskan organisasi nirlaba ini untuk menyusun pertanggungjawaban pengelolaan dana yang relevan. Hal ini bertujuan agar kepercayaan publik meningkat terhadap lembaga atau organisasi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini mendorong semua organisasi atau komunitas sosial kemasyarakatan yang mengumpulkan dana dari masyarakat seperti *dana punia*, ataupun sumbangan keagamaan lainnya untuk memberikan akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan tersebut harus disusun pelaporan akuntansi.

Pelaporan akuntansi ini diakomodir di aturan yang tertuang dalam PSAK 45 terkait Akuntansi Nirlaba yang terus dikembangkan agar penerapannya layak dan kualitas dari akuntansi pertanggungjawaban organisasi nirlaba meningkat.

Daftar Pustaka

- Badu, R. S., & Hambali, I. R. (2014). Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi kasus di Kabupaten Gorontalo). *Laporan Penelitian. Universitas Gorontalo*.
- Bali, S. I. K. (2020). Implementasi Dana Punia Menurut Ajaran Agama Hindu. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 54-61.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma interpretif pada penelitian akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350-361.
- Handayani, P. D., Atmadja, A. T., Se, A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Sistem Dana Punia Di Desa Pakraman Bangkang, Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Kajeng, I Nyoman. (2009). *Sarasamuccaya*. Surabaya:Paramita.
- Mandarin, I. K. S., Atmadja, A. T., Se, A., Herawati, N. T., & Ak, S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Sistem Dana Punia Pura Goa Giri Putri Di Desa Pakraman Karang Sari, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Opti, S. (2020). Analisis Implementasi PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Masjid di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 39-51.
- Pudja, Gde. (2003). *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*. Surabaya: Paramita.
- Ratini, N. K. (2018). Strategi Penggalan Dana Punia Pada Umat Hindu Kota Palu Dalam Pembangunan Candi Kurung Pura Agung Wana Kertha Jagatnatha Sulawesi Tengah (Perpektif Pendidikan Agama Hindu). *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1(2), 87-92.
- Rini, R. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2).
- Sulistiani, L. P. D., Atmadja, A. T., Se, A., Herawati, N. T., & Ak, S. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Di Dadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Triani, N. N. A., & Satyawan, M. D. (2016). Memaknai Sisi Akuntansi Sumbangan Keagamaan Masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 240-255.